

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang dalam KUHP jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan pada tahun 1964, aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan.<sup>1</sup>

Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Konsepsi masyarakat seperti ini tidak banyak berarti banyak jika hukum pidana nasional mendatang tidak mengakomodasi dalam ketentuannya.

---

<sup>1</sup> Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses tanggal 15 Februari 2010, jam 22.15 WIB.

Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang lebih kuat di bandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain.

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga dapat

dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.<sup>2</sup>

Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku. Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP dan jika dilakukan oleh mereka yang belum dalam ikatan pernikahan dengan orang lain tidak termasuk pula. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan di antara suami isteri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.<sup>3</sup>

Pandangan masyarakat demikian ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Sahetapy perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan,

---

<sup>2</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal 102

<sup>3</sup> Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Hal 89

tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzinah mencakup pengertian *overspel*, *fornication* dan *prostitusi*.<sup>4</sup>

Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya tindak pidana perzinahan yaitu dengan memfungsikan instrument hukum pidana yang bersifat preventif dan represif, seperti tujuan pemidanaan yang tercantum dalam konsep RUU KUHP Nasional yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>4</sup> Sahetapy dan B. Mardjno Reksodiputro. 1989. *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali. Hal 62

Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.<sup>5</sup> Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

Berawal dari rasa keprihatinan di atas dan didorong oleh suara hati penulis dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perzinahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang lebih dalam dan menuangkannya dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan-batasan tentang tindak pidana perzinahan menurut kasus-kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen?
2. Bagaimana batasan pengertian tindak pidana perzinahan menurut masyarakat Sragen?
3. Alasan-alasan kasus perzinahan yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Sragen?

---

<sup>5</sup> Liliana Tedjosaputro. 2003. *etika profesi dan profesi hukum*. Aneka ilmu. Hal 15-16

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui batasan-batasan tentang tindak pidana perzinahan menurut kasus-kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen.
2. Untuk mengetahui batasan atau pengertian tindak pidana perzinahan menurut masyarakat Sragen.
3. Untuk mengetahui Alasan-alasan kasus perzinahan yang tidak diajukan di Pengadilan Negeri Sragen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian seperti yang tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang lebih mendalam, khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak

pidana perzinahan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sehingga sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum Negara wajib menegakkan hukum dan keadilan seadil-adilnya serta mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan termasuk tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain yang salah satunya adalah tindak pidana perzinahan.

Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 1) Faktor hukumnya sendiri; 2) Faktor penegak hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat; 5) Faktor kebudayaan.<sup>6</sup> Dalam penegakan hukum pada hakekatnya mengandung tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : 1) Kepastian hukum; 2) Kemanfaatan; 3) Keadilan.<sup>7</sup>

Bentuk perzinahan ternyata telah menjadi tindakan-tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo. 1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Hal 116

<sup>7</sup> Sudikno Martokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal 134

Penanganan tindak pidana yang tidak tepat serta sikap keragu-ruguan aparat penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari para pelaku tindak pidana perzinahan. Di sini para penegak hukum tidak dapat dan tidak mampu berbuat banyak dalam melakukan penegakan tindak pidana perzinahan, disebabkan tindak pidana perzinahan termasuk dalam tindak pidana aduan. Karena pada tindak pidana aduan, kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan yang bersifat individu atau sangat pribadi. Selama ini aparat penegak hukumnya melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dianggap telah melakukan keadilan bagi korban. Akan tetapi pada kenyataannya dalam melakukan penegakkan hukum aparat hukum kurang memperhatikan rasa sakit yang dialami korban kejahatan, karena korban dan pelaku tindak pidana perzinahan sangat sulit dibedakan. Karena yang mengalami tindak pidana perzinahan dan yang lebih ditekankan adalah suami-istri yang sudah menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, padahal selain suami-istri tindak pidana perzinahan dapat dilakukan oleh semua orang yang belum menikah.

Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tidak diatur secara khusus dalam delik perzinahan menurut KUHP. Maka system pembuktian delik perzinahan sama dengan sistem pembuktian delik-delik yang lain. Artinya, alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;



3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Selanjutnya Pasal 185 ayat (3) mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.<sup>8</sup>

Dalam upaya penegakan dan penanganan kasus tindak pidana perzinahan, Polisi haruslah tetap menggunakan pedoman atau hukum yang berlaku. Yaitu KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Mengingat dalam penerapan hukum masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakannya, maka masih perlu koreksi dalam penegakan hukumnya. Untuk itu penulis mencoba menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perzinahan dan juga hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>8</sup> Artikel Karya Ahmad Bahiej. *Op Cit.* Hal 3

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normative empiris. Karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan dengan melakukan inventarisasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Namun demikian, untuk mendukung dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara empiris, dilakukan dengan mengkaji pandangan masyarakat dalam memberikan opini atau pendapat mengenai tindak pidana perzinahan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat “deskriptif”, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti.<sup>9</sup> Dari penelitian tersebut, Penulis kemudian menggambarkan tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan, khususnya di dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dari lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Hal. 13

diteliti. Dalam hal ini adalah masyarakat Sragen serta Pejabat Pengadilan Negeri Sragen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung menjadi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Sutrisno Hadi menjelaskan:<sup>10</sup>

*“Baik buruknya hasil research/penelitian tergantung pada teknik pengumpulan datanya atau untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan reliable. Pekerjaan research menggunakan teknik-teknik, alat-alat serta kegiatan-kegiatan yang dependable yang dapat dihandalkan”.*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terlebih dahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi. *Op Cit.* Hal. 25

b. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lisan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan responden tersebut. Kepada Masyarakat Sragen dan Pejabat Pengadilan Negeri Sragen. Mengenai masalah-masalah yang dikemukakan di atas.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting, agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan di atas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis normative kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang kemudian mendiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteleti sebagai kesatuan yang utuh, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

**G. Sistematika Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara Bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, pembatasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi: tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan mengenai tindak pidana, tinjauan mengenai tindak pidana perzinahan.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berisi batasan-batasan tentang tindak pidana perzinahan menurut kasus-kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen, batasan pengertian tindak pidana perzinahan menurut masyarakat Sragen, serta alasan-alasan kasus perzinahan yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Sragen.

Bab IV Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran yang menjadi penutup skripsi.